

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Perempuan di Industri Film Indonesia

Industri perfilman di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang baik. Pada 2020 terdapat 1800 layar bioskop di Indonesia, dan mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 2.088 layar bioskop. Menurut Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin, jika tidak ada pandemi covid-19 jumlah layar bioskop di Indonesia bisa mencapai 3.000 layar bioskop. (www.kompas.id diakses pada 22 November 2023). Ricky Pesik selaku Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, mengatakan jika perkembangan jumlah penonton bioskop di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2020) mengalami peningkatan hingga 230%. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) merinci total jumlah penonton di Cinema XXI pada tahun 2023 sebesar 22,3 juta penonton, dimana jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 20,8 juta penonton. (www.katadata.co.id diakses pada 22 November 2023). Jumlah penonton tersebut hanya berasal dari Cinema XXI, belum termasuk dari CGV, Cinepolis dan berbagai jenama bioskop yang lain.

Tidak hanya dari banyaknya jumlah penonton, perkembangan industri film Indonesia tetapi juga termasuk dalam kualitas serta keragaman dari film yang diproduksi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya film-film lokal yang

ditayangkan di bioskop, bersanding dengan film-film dari luar negeri. Dengan eksisnya film-film lokal saat ini jenis dan pilihan temanya pun semakin beragam, seperti film aksi, romansa, komedi, horor dan lain-lain. Di dalam film-film Indonesia tersebut terdapat sosok yang tidak bisa diabaikan, yaitu perempuan. Kehadiran perempuan dalam industri film di Indonesia dari dekade ke dekade mengalami perubahan. Dimana perubahannya tidak hanya pada mode dan riasan, tetapi juga identitas serta peran perempuan di dalam masyarakat. Sejarah perempuan di industri film Indonesia dapat menunjukkan jika pada awalnya perempuan tidak digambarkan sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah peran perempuan dari periode ke periode di industri film Indonesia: (www.kincir.com diakses pada 23 November 2023)

- Periode 50an dan 60an

Pada periode ini adalah tonggak dari industri film Indonesia, bahkan 30 Maret 1950 diperingati sebagai Hari Perfilman Nasional. Oesmar Ismail sebagai salah satu sutradara Indonesia yang berjaya pada periode 50-an, mengangkat laki-laki sebagai tokoh utama dalam filmnya yang berjudul *Lewat Djam Malam* (1954). Hal tersebut dikarenakan ia mengangkat tema trauma pascaperang dan kebanyakan yang pergi ke medan perang adalah laki-laki, sehingga tokoh utama yang mengalami kegelisahan adalah laki-laki. Sedangkan perempuan digambarkan menjadi seorang kekasih, PSK hingga korban pembunuhan. Kemudian pada tahun 1956 Oesmar merilis *Tiga Dara*. Di film ini perempuan digambarkan lebih feminin dengan dipenuhi nyanyian, keceriaan

serta tingkah laku yang manis. Pada masa itu Tiga Dara bisa disebut sebagai terobosan baru dalam dunia perfilman Indonesia karena perempuan digambarkan mempunyai cerita dan konfliknya sendiri. Akan tetapi di film ini, perempuan digambarkan hanya berada di ranah domestik dan perempuan tidak memiliki kebebasan dalam memilih pasangannya. Hal tersebut dibuktikan dari Nenek yang memaksa mencari jodoh untuk cucu pertamanya yaitu Nunung karena ia sudah berusia 29 tahun. Sedangkan Nunung dan Ayahnya tidak mempermasalahkan jika Nunung masih *single* di usia tersebut. Selain itu di film ini terdapat tuntutan jika perempuan itu harus cantik, yang ditunjukkan lewat adegan ketika Nunung akan dikenalkan dengan teman-teman ayahnya, kemudian sang nenek menyuruhnya untuk mandi dan bersolek. Hal tersebut membuktikan jika film Tiga Dara masih kental akan patriarki dan *male gaze*.

Sedangkan pada tahun 60-an, perempuan digambarkan memiliki konflik dalam profesi hingga percintaan, tidak hanya dalam keluarga saja. Di periode ini profesi perempuan dalam film banyak digambarkan menjadi seorang penyanyi, aktris, hingga lulusan Sekolah Kepandaian Putri (SKP).

- Periode 70-an:

Berbeda dengan penggambaran perempuan di periode sebelumnya, pada periode ini perempuan cenderung dijadikan objek seksual. Perempuan digambarkan menjadi korban dari kejahatan laki-laki dalam hal seksual seperti perempuan dijadikan fantasi seksual, korban pemerkosaan hingga perdagangan

perempuan dan diceritakan pada akhirnya hidup mereka hancur karena menjadi seorang korban. Contoh film-film pada tahun 70-an yang berhubungan dengan perempuan adalah *Bernapas dalam Lumpur* (1970) yang menceritakan seorang perempuan bernama Supinah mencari suaminya di Jakarta hingga terjebak dalam perdagangan perempuan. Kemudian ada *Samiun dan Dasima* (1970), di film ini diperlihatkan payudara perempuan serta ciuman erotis.

- Periode 80-an:

Sebenarnya di periode ini masih ada beberapa film yang menampilkan adegan terbuka, tetapi umumnya perempuan digambarkan menjadi seseorang yang berpendidikan, bergaya, dinamis dan memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan serta peran yang biasa dilakukan laki-laki. Selain itu perempuan juga digambarkan lebih berani dalam menyuarakan pendapatnya, berani memilih gaya yang disukai, hingga bersekolah sampai perguruan tinggi. Beberapa contoh film di periode ini adalah *Masih Adakah Cinta* (1980), *Begadang Karena Penasaran* (1980) dan *Roman Picisan* (1980). Selain itu ada film sejarah berjudul *Tjoet Njak Dien* (1988) dimana film ini menggambarkan perjuangan seorang perempuan yaitu Cut Nyak Dien yang berani melawan penjajah hingga menjadi wakil rakyat bagi daerah Aceh. Sedangkan di film *Catatan Si Boy* dan *Warkop DKI*, perempuan ditampilkan berani berpendapat, penuh semangat hingga memakai *outfits* yang biasanya dipakai oleh laki-laki.

- Periode 90-an:

Di periode tahun 90-an muncul saluran-saluran TV swasta yang memberikan hiburan baru bagi masyarakat Indonesia selain film di bioskop. Hal tersebut menyebabkan para pembuat film tidak serius dalam membuat film yang berkualitas hingga Festival Film Indonesia diberhentikan pada periode ini. Film yang dibuat penuh erotisme dan perempuan dijadikan objek seksual yang dapat menarik penonton laki-laki. Judul yang sensualitas hingga poster yang menampilkan lekuk tubuh perempuan, sangat lekat dengan film-film yang diproduksi di periode ini. Contoh film pada periode ini adalah *Gadis Metropolis* (1991), *Kenikmatan Tabu* (1994), *Nafsu X* (1996), *Birahi Perempuan Halus* (1997). Selain itu pada periode banyak muncul aktris yang mempunyai julukan bom seks.

- Periode 2000-an:

Akibat dari kesuksesan *Ada Apa dengan Cinta?* (2001), perempuan di film cenderung digambarkan seperti tokoh Cinta. Perempuan ditampilkan muda, gaul, tidak ketinggalan zaman, dan berpendidikan. Karakter perempuan seperti itu bisa dijumpai dalam *Hari Mencari Cinta* (2004), *Me vs High Heels* (2005), dan *Eiffel I'm in Love* (2003). Citra perempuan pada film di periode ini erat kaitannya dengan sekolah, musik, pergaulan ibukota, karier hingga cinta modern.

- Periode 2010-an hingga sekarang:

Sebenarnya Indonesia sempat kembali ke masa film bertema horor erotis, tetapi masa tersebut tidak berlangsung lama karena lebih banyak film berkualitas yang dirilis pada periode ini. Beruntungnya di zaman sekarang perempuan di film Indonesia memiliki peran yang lebih beragam. Ada ibu rumah tangga yang tetap memegang adat istiadat seperti di film *Ngeri-Ngeri Sedap* hingga perempuan menjadi petarung seperti di *The Night Comes from Us*, *Gundala*, *The Raid* dan *Mencuri Raden Saleh*. Biasanya dalam film horor perempuan identik dijadikan sebagai hantu, di periode ini perempuan dapat menjadi penggerak dalam film horor. Seperti dalam film *Kafir* dan *Perempuan Tanah Jahanam*. Selain itu film-film di zaman ini lebih bersahabat dengan perbedaan, dimana para pemeran perempuan tidak selalu memiliki kulit putih, langsing, tinggi, atau memiliki badan seperti gitar spanyol.

Perempuan memiliki peran yang penting bagi penggerak perubahan. Perubahan tersebut bertujuan agar perempuan bisa melepaskan diri dari diskriminasi dan stereotip sehingga dapat tercipta kehidupan yang adil dan setara bagi perempuan di masyarakat. Tetapi hal tersebut membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, sebab data dan fakta yang ada di lapangan menyebutkan jika masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi hingga kekerasan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan perempuan adalah dengan menyuarakan kekerasan yang mereka alami atau temui. Kehadiran perempuan di industri film Indonesia dapat menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan permasalahannya yang tidak bisa tersampaikan karena dominasi

laki-laki. Industri film Indonesia dapat membantu mewujudkan cita-cita tersebut dengan menampilkan peran serta suara perempuan dalam film. Film yang ditulis dan disutradarai oleh perempuan yang membahas soal masalah perempuan dapat menjadi cara salah satu cara untuk menyuarakan suara yang biasanya disunyikan. Suara perempuan disini dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang dari pengalaman yang dialami perempuan (Sulistiyani, 2021 : 67).

Salah satu contoh film yang ditulis, disutradarai dan diperankan oleh perempuan adalah film “Yuni” (2021). Film Yuni (2021) ditulis dan disutradarai oleh Kamila Andini dan diperankan oleh aktor serta aktris seperti Arawinda Kirana, Asmara Abigail, Marissa Anita, Dimas Aditya, Kevin Ardilova dan lainnya. Film ini berkisah soal perempuan bernama Yuni yang ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak didukung oleh lingkungan beserta orang-orang disekitarnya karena mereka menyuruh Yuni yang masih duduk di bangku SMA untuk segera menikah. Orang-orang di lingkungan Yuni seakan-akan menormalisasi hal tersebut karena terlihat dari teman-teman seumuran Yuni yang telah menikah dan mempunyai anak. Kamila Andini mengarahkan tokoh Yuni dan teman-temannya untuk berupaya melawan domestifikasi yang menimpa mereka. Salah satu bentuk perlawanan perempuan di dalam film ini adalah Yuni menolak lamaran Iman karena ia ingin melanjutkan pendidikan. Selain itu terdapat tokoh Teh Suci yang diceritakan berani menggugat cerai suaminya yang *abusive*. Cerita perlawanan yang dilakukan Yuni dan teman-temannya dapat dijadikan kekuatan bagi perempuan lain ketika ada orang lain

yang menindasnya serta menjadikan perempuan untuk berani bersuara mengenai perasaannya.

Akan tetapi masih terdapat film soal perempuan yang sudut pandang ceritanya tidak berasal dari perempuan karena ditulis dan disutradarai oleh laki-laki. Misalnya film *27 Steps of May* (2018) yang menceritakan soal pemerkosaan yang dialami oleh seorang perempuan bernama May. Di film tersebut diceritakan bagaimana ia harus berjuang melawan ketakutan serta traumanya sebagai korban dari pemerkosaan. Walau film tersebut menceritakan soal trauma seorang perempuan korban pemerkosaan, akan tetapi penulis serta sutradaranya adalah seorang laki-laki. Hal ini membuktikan jika di industri film Indonesia tidak hanya tubuh perempuan yang sering diartikan lewat cara pandang dari laki-laki, tetapi juga suara perempuan. Suara perempuan di film dialognya diucapkan oleh tokoh perempuan, tetapi isi dari dialog tersebut berasal dari sudut pandang laki-laki. Sudut pandang laki-laki yang dimaksud adalah sudut pandang dari sang pembuat film seperti penulis, sutradara, atau produsernya yang merupakan seorang laki-laki. Saat hal tersebut terjadi, seakan-akan suara perempuan tersebut menyetujui penindasan yang dialaminya.

Menurut Asosiasi Pengkaji Film Indonesia (KAFEIN) setelah reformasi partisipasi perempuan di industri film Indonesia semakin meningkat, walau jumlahnya tidak besar. KAFEIN juga melakukan analisis serta pengumpulan data terkait status keseimbangan gender di industri film Indonesia yang hasilnya menyebutkan jika partisipasi perempuan di 9 profesi kunci produksi film kurang dari 20%. Tercatat juga

perempuan yang menerima penghargaan di Festival Film Indonesia (FFI) sejak tahun 1955 hingga 2019 hanya sebesar 8% (<https://kafein.or.id/penelitian/> diakses pada 30 November 2023). Sehingga partisipasi perempuan di industri film Indonesia perlu untuk ditingkatkan dengan dibarengi ditampilkannya suara perempuan. Suara perempuan untuk menggugat dan menyuarakan penindasan yang mereka terima dapat melalui fokalisasi. Fokalisasi dapat menjadi pendorong bagi perempuan agar mereka menceritakan kisahnya. Bagi perempuan, fokalisasi berarti memperlihatkan konten emosional dan ideologis mereka sendiri, yang diwakili oleh pengalaman tokoh protagonis perempuan (Sulistiyani, 2021 : 70).

2.2 Film Like & Share

Like & Share (2022) adalah film yang mengisahkan dua remaja putri yang sedang tertarik untuk eksplorasi dunia remaja. Dibintangi oleh Arawinda Kirana dan Aurora Ribero, film ini juga ditulis serta disutradarai oleh perempuan yaitu Gina S. Noer. Selain Arawinda dan Aurora, aktor dan aktris yang membintangi film ini adalah Aulia Sarah, Jerome Kurnia, Kevin Julio, Unique Priscilla dan lainnya.

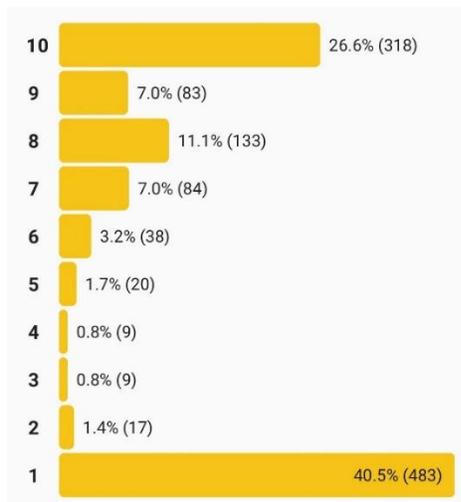


Gambar 2.1 Poster Film *Like & Share* (2022)

Film *Like & Share* dirilis pada 8 Desember 2022 bertepatan dengan hari anti kekerasan terhadap perempuan yang setiap tahun dirayakan dari 25 November hingga 10 Desember. Film ini berdurasi 112 menit yang menceritakan soal persahabatan diantara Sarah (Arawinda Kirana) dan Lisa (Aurora Ribero) yang menjadi *content creator* video ASMR. Kedua remaja tersebut diceritakan melakukan eksplorasi hal-hal baru terkait pubertas hingga seksualitas. Eksplorasi ini menimbulkan beberapa masalah yang harus mereka berdua hadapi. Mulai dari Lisa yang kecanduan bokep hingga Sarah yang diperkosa oleh pacarnya.

Film karya Gina S Noer ini secara tegas membahas soal kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, terutama pada remaja. Selain itu Film *Like & Share* juga

digunakan untuk mempromosikan atau mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai kaum yang tertindas. Dalam konferensi pers film Like & Share, Gina mengatakan “Sebagai seorang ibu dari anak remaja putri, saya memiliki keresahan bagaimana agar anak saya tumbuh dalam relasi yang aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,”. Lewat film ini Gina ingin memperlihatkan sulitnya penanganan hukum pada kekerasan seksual serta bagaimana kita bisa menjadi lebih baik jika bersama-sama berpihak pada sisi korban. (<https://rb.gy/rdi0t0> diakses 30 November 2023).



Gambar 2.2 Rating Film Like & Share (2022) di Situs imbd.com

Film ini telah mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional karena meraih penghargaan Gran Prix atau Best Picture Award di Osaka Asian Film. Selain itu film ini juga meraih penghargaan di Festival Film Tempo dengan kategori “Skenario Pilihan Tempo” (<https://shorturl.at/ehpHV> diakses 19 Juni 2023). Terlepas

dari tujuan edukasi serta prestasi dari film Like & Share, film ini mendapatkan banyak rating bintang satu di situs IMDb akibat dari skandal perselingkuhan yang menimpa salah satu pemeran utamanya yaitu Arawinda Kirana.

2.3 Gerakan Feminisme di Indonesia

Feminisme merupakan sebuah pemikiran, gerakan serta gagasan yang memiliki prinsip kesetaraan dan kesamaan hak dari perempuan dan laki-laki (Ritzer & Ryan, 2010 : 223). Walaupun gerakan feminisme telah mengalami berbagai kemajuan, hingga saat ini masih ada kelompok yang kontra soal gerakan feminisme. Adanya pro kontra soal gerakan feminisme terjadi karena gerakan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai di Indonesia terutama nilai agama. Hal tersebut menjadikan gerakan feminisme atau bisa disebut sebagai gerakan perempuan seringkali dikaitkan dengan ideologi Barat dan tidak memiliki akarnya sendiri di Indonesia. Padahal setiap negara mempunyai sejarahnya masing-masing terkait perjuangan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender.

Sejarah feminisme di Indonesia berakar dari masa penjajahan kolonial Belanda, dimana pada masa itu perempuan Indonesia mendapatkan banyak diskriminasi. Dari situlah muncul gerakan perempuan di Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi serta memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada akhir abad ke-19, banyak perempuan Indonesia yang ikut turun ke medan perang untuk melawan

penjajah. Beberapa tokoh pahlawan perempuan Indonesia yang turun langsung melawan penjajah adalah Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Dewi Sartika dan lainnya. Selain itu gerakan perempuan yang paling diingat oleh generasi saat ini adalah Raden Ajeng Kartini yang berusaha untuk memperjuangkan hak perempuan Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan seperti laki-laki pada masa itu. Berikut ini adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia dari setiap periode: (Blackburn, 2004 : 17-31)

- Kolonial (1900-1942)

Pada periode ini Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Gerakan perempuan pada periode kolonial dimulai oleh anak seorang priyayi Jawa bernama Raden Ajeng Kartini yang merasa kesal karena perempuan dibatasi hanya boleh menempuh pendidikan sampai sekolah dasar. Pada masa itu anak perempuan yang menginjak usia remaja lebih baik dinikahkan. Sedangkan ia melihat saudara laki-laknya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat universitas. Kekesalan tersebut yang mendorong Kartini untuk membebaskan perempuan dari kungkungan adat. Kartini menyuarakan semangat hingga kekecewaannya lewat surat-surat yang ia tulis. Surat-surat tersebut berisi perihal peningkatan pendidikan bagi perempuan dari semua golongan hingga penolakan poligami (www.nalarpolitik.com diakses 2 Desember 2023).

Sepeninggal Kartini pada tahun 1904, tidak menghentikan gerakan perempuan di Indonesia. Pada tahun 1912 didirikan organisasi perempuan di Indonesia bernama Poetri Mardika (Perempuan Merdeka). Pendirian organisasi

ini erat kaitannya dengan Boedi Oetomo selaku organisasi nasional pertama di Indonesia. Lima tahun kemudian dibentuk organisasi perempuan Islam Muhammadiyah dengan nama “Aisyiyah”. Di tahun 1920 beberapa organisasi perempuan mulai bersatu hingga pada tahun 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang menghasilkan keputusan pendirian “Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI). Selain pembentukan PPPI, kongres ini juga menghasilkan keputusan terkait peningkatan pendidikan bagi perempuan hingga meningkatkan posisi hukum perempuan dalam pernikahan.

- Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada tahun 1942, penjajahan Belanda di Indonesia diambil alih oleh Jepang karena kemenangannya di Perang Pasifik. Di periode ini laki-laki bergabung dalam pasukan perang, sementara perempuan diwajibkan mendukung laki-laki hingga ada perempuan-perempuan muda yang mengabdikan diri di militer sebagai pelacur. Gerakan perempuan Indonesia pada periode ini didominasi oleh angkatan bersenjata Jepang. Organisasi perempuan buatan Jepang adalah Fujinkai untuk daerah Jawa-Bali dan di Sumatra terdapat Hahanokai, dimana organisasi tersebut berpusat pada nasionalisme dan berkontribusi pada perekonomian. Di periode ini perempuan tidak diberi kesempatan menyuarakan tuntutan mereka kepada negara atau berorganisasi secara mandiri.

- Revolusi Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Setelah penjajahan Jepang berakhir, Indonesia berada pada masa Revolusi. Pada periode ini Indonesia telah memiliki pendirian jelas terkait gender yang tercermin dalam sejumlah dekret dan UUD 1945 yang menyatakan jika semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setelah kepergian Jepang, organisasi-organisasi perempuan di Indonesia mulai bermunculan kembali. Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) merupakan salah satu organisasi perempuan non-agama yang muncul pada awal masa revolusi. Kemudian berdiri “Muslimat NU: yaitu organisasi perempuan Islam Jawa tradisional yang berakar dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 1946 berdiri Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang terdiri dari beberapa organisasi wanita dengan berorientasi nasionalis. Kowani adalah penerus dari Kongres Perempuan Indonesia pada masa kolonial dan organisasi ini masih bertahan hingga saat ini.

Di periode kolonial dan masa pendudukan Jepang, organisasi perempuan berfokus dalam kelangsungan hidup keluarga dalam masa-masa sulit serta memberi dukungan pada pahlawan perjuangan. Unit pertempuran perempuan dibentuk tetapi kegiatan yang umum dilakukan adalah pemberian pertolongan pertama dan makanan bagi prajurit. Walau di periode revolusi negara hanya berkontribusi sedikit bagi perempuan, tetapi masa ini adalah masa kritis bagi kelanjutan hubungan negara dengan gerakan perempuan.

- Negara Demokratis (1949-1958)

Di periode ini Indonesia menggunakan rezim parlementer setelah adanya pengalihan kedaulatan. Periode demokrasi parlementer ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum pertama di tahun 1955. Usaha pemerintah untuk mendorong terciptanya kesetaraan dapat dilihat dalam UU yang menyatakan kesetaraan upah bagi pegawai negeri, promosi pendidikan dan program melek huruf untuk orang dewasa. Kontribusi negara paling besar bagi organisasi perempuan di periode ini adalah kebebasan yang diberikan bagi organisasi-organisasi perempuan untuk menentukan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan hingga tingkat desa.

Organisasi perempuan terbesar yang berkembang di periode ini adalah Kowani. Sedangkan Perwari dan Gerwani adalah organisasi perempuan paling vokal yang menyuarakan suara perempuan ke negara, dimana organisasi ini condong ke arah radikal. Di pemilu pertama tahun 1955, anggota parlemen perempuan yang terpilih hanya sekitar 7% dari total keseluruhan. Setelah adanya awal yang menjanjikan bagi perempuan di periode ini, kemudian tidak ada lagi menteri perempuan yang menjabat di kabinet-kabinet tahun 1950-an. Adanya ketidakstabilan kabinet membuat kampanye gerakan perempuan terkait UU perkawinan terabaikan.

- Demokrasi Terpimpin (1958–1965)

Diperkenalkannya Demokrasi Terpimpin pada tahun 1958 merubah keseimbangan antara negara dan gerakan perempuan. Di periode ini perempuan

harus mengabdikan diri mereka pada negara, serta kepentingan nasional harus diutamakan dibandingkan isu-isu soal perempuan. Gerwani merupakan organisasi perempuan yang dominan pada periode Demokrasi Terpimpin, karena mendapatkan keuntungan serta kemurahan hati Soekarno kepada PKI. Perempuan anggota organisasi hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka kepada negara, dimana hal tersebut menunjukkan jika negara memiliki minat yang kecil untuk mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Pada periode Demokrasi Terpimpin, perempuan banyak terdampak hal-hal negatif karena pengabaian perekonomian pada tahun-tahun di periode ini.

- Orde Baru (1965-1998)

Periode Orde Baru atau biasa disingkat “Orba” memandang perempuan sebagai kelompok yang penting dalam masyarakat dan harus berperan dalam menjamin stabilitas sosial, perencanaan pembangunan dan pengurangan angka kelahiran. Di awal periode orba, perempuan dilihat sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga. Perempuan selalu dikaitkan dengan kodrat mereka yaitu pengajar bagi anaknya dan generasi muda. Pada periode ini pembentukan karakter ‘bapak’ dan ‘ibu’ sangatlah kuat, dimana seorang bapak dapat berperan menikmati kekuasaan serta hak istimewa sedangkan seorang ibu melakukan tugas-tugas domestik tanpa imbalan kecuali lewat suami mereka. Ciri khas ideologi gender pada periode Orde Baru adalah “ibuisme negara”, dimana

puncaknya adalah fenomena organisasi istri. Seiring berkembangnya fenomena organisasi istri, mereka mendominasi Kowani. Dharma Wanita adalah organisasi istri terbesar yang diperuntukkan bagi istri pegawai negeri. Dharma Wanita dihubungkan dengan Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan disponsori negara di awal tahun 1970-an. PKK merupakan sarana yang digunakan negara untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur jumlah kelahiran bayi.

Ideologi gender di periode Orde Baru tidak dapat mengatur semua pemikiran perempuan Indonesia. Banyak bermunculan perempuan muda yang berpendidikan akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi. Mereka memiliki pandangan independen tentang peran mereka di masyarakat. Beberapa dari perempuan muda ini mendirikan organisasi perempuan independen baru di tahun 1980-an, dimana mereka mengangkat isu-isu yang lebih radikal seperti hak buruh perempuan. Organisasi ini disebut sebagai LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat – Lembaga Sosial Masyarakat. Beberapa LSM yang muncul pada tahun 1980-an adalah “LBH-APIK”, “Yayasan Annisa Swasti”, “Rifka Annisa” dan “Solidaritas Perempuan”.

- Reformasi (1998-2003)

Setelah jatuhnya Orde Baru, negara memberikan kembali kesempatan kepada masyarakat untuk berorganisasi secara mandiri. Pada pemerintahan Wahid (1999-2001) ditunjuk menteri perempuan yang sangat feminis dan Islami yaitu

Khofifah Indar Parawansa. Ia mengubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pada Desember tahun 1998 terdapat aliansi perempuan baru bernama “Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi”. Aliansi tersebut menyelenggarakan kongres nasional perempuan yang membahas soal keprihatinan dan desentralisasi pada gerakan perempuan pasca Orde Baru.

Selain saat masa pemerintahan Wahid, di pemerintahan Habibie (1998-2000) ia juga menunjukkan dukungannya kepada gerakan perempuan dengan membentuk “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”. Walau demikian jumlah perempuan di parlemen justru mengalami penurunan pada pemilihan umum tahun 1999, yang menunjukkan jika perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam sistem partai politik. Partai politik pada periode ini juga tidak menunjukkan minat yang besar terhadap isu-isu perempuan.

2.4 Isu dalam Gerakan Feminis Masa Kini

Perempuan pada masa ini tetap perlu melanjutkan usaha dan perjuangan perempuan-perempuan di periode sebelumnya agar senantiasa mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Terlebih lagi isu-isu yang harus dihadapi perempuan masa kini lebih kompleks dibandingkan masa lalu akibat pengaruh dari kondisi masyarakat yang terus

berubah seiring berjalannya waktu. Isu yang dihadapi gerakan feminis di setiap periode sangat bergantung pada situasi dan kondisi zaman yang sedang dihadapi.

Dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan anak, Kementerian yang mengurus persoalan anak dan perempuan yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atas arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, memiliki 5 peran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan
2. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan peran ibu serta keluarga di pendidikan dan pengasuhan anak
4. Menurunkan angka pekerja anak
5. Mencegah perkawinan anak

Terwujudnya strategi diatas, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IDG). Perhitungan dari IDG bisa menggunakan indikator IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM dapat melihat kemajuan dari pembangunan lewat 3 hal yaitu usia panjang dan hidup sehat, standar hidup layak, dan pendidikan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2023, Kementerian PPPA menuturkan data IPM Perempuan pada tahun 2022 sebesar 70,31 yang lebih rendah dibanding IPM laki-laki dengan nilai 76,73. Selain IPM, pada TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, perempuan memperoleh nilai 61,82% masih jauh dibawah laki-laki sebesar 86,37% (www.kompas.id diakses 4 Desember 2023). Hal tersebut menunjukkan jika

pembangunan hidup perempuan serta keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja juga masih tertinggal jika dibandingkan dengan laki-laki.

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang dapat menunjukkan peran aktif dari perempuan di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. IDG Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 76,5% yang hanya sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 76,26% (2021). Persentase IDG tersebut diperoleh dari indikator perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer profesional, administrasi, teknisi, dan indikator perempuan dalam pendapatan kerja. Untuk persentase perempuan di parlemen masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 21,89% dibanding laki-laki yang memiliki persentase 78,11%. Kemudian untuk indikator perempuan sebagai tenaga manajer profesional, administrasi, teknisi, perempuan hampir dapat mengimbangi laki-laki yaitu 49,99% untuk perempuan dan 50,01% untuk laki-laki. Dari indikator ekonomi yaitu sumbangan dalam pendapatan kerja, laki-laki masih lebih unggul yaitu 62,78% sedangkan perempuan 37,22% (Tabel 2.1). Berikut ini adalah data capaian indikator komponen penyusun IDG Indonesia pada tahun 2021: (LAKIP KemenPPPA, 2022)

Indikator	Capaian	
	Laki-laki	Perempuan
Persentase Parlemen	78,11	21,89
Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	50,01	49,99
Sumbangan dalam Pendapatan Kerja	62,78	37,22

Tabel 2.1 Capaian Indikator Komponen Penyusunan IDG Indonesia

Selain dilihat dari persentase IDG secara keseluruhan, persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu diperhatikan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah salah satu isu yang sedang disorot oleh KemenPPPA, karena dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 339.789 kasus dimana terdapat peningkatan sebanyak 0.38% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 338.496 (<https://shorturl.at/fzJN2> diakses 12 Juni 2023). Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan perkawinan hingga prostitusi paksa.

Salah satu usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dilansir dari katadata.co.id, terdapat beberapa poin yang perlu dipahami terkait UU TPKS, yaitu:

- Segala perilaku pelecehan seksual masuk ke dalam kekerasan seksual
- Memberi perlindungan bagi seluruh korban kekerasan seksual
- Memberi denda serta pidana bagi pemaksaan berhubungan seksual
- Memberi denda serta pidana bagi tindak pemaksaan perkawinan
- Memberi denda serta pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual
- Memberi denda serta pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan TPKS

- Adanya satu keterangan dari korban atau saksi serta satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan.
- Korban berhak mendapat layanan pemulihan dan restitusi
- korban berhak memperoleh pendampingan
- Tidak diperbolehkan penggunaan *restorative justice*

Meski telah disahkan UU TPKS ini pada 12 April 2022, korban kekerasan seksual masih belum bisa sepenuhnya bergantung pada undang-undang ini. Sebab masih banyak aparat penegak hukum yang menanggapi kasus kekerasan seksual tanpa paradigma perlindungan korban. Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan mengatakan jika aparat perlu diberi sosialisasi mengenai pelecehan seksual dan UU TPKS. Masih ada aparat yang mengabaikan laporan kasus kekerasan seksual dengan berbagai alasan. Fenomena ini disebabkan rendahnya perspektif gender di kepolisian karena jumlah aparat di Indonesia sebanyak 435.696 personil, masih didominasi oleh laki-laki sebesar 94,93% dan polisi wanita hanya 5,91% saja. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan bias gender saat menghadapi kasus kekerasan seksual yang korbannya didominasi oleh perempuan. (<https://ykp.or.id/> diakses 11 Desember 2023).

Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dari tahun ke tahun angkanya selalu meningkat hingga aparat penegak hukum yang tidak bisa sepenuhnya tidak dapat diandalkan terkait perlindungan korban, membuat para perempuan semakin tidak tenang dan merasa tidak aman dalam menjalani hidup. Salah satu usaha untuk

memberikan *aware* kepada masyarakat hingga aparat untuk mencegah kasus kekerasan agar tidak semakin meningkat, maka digunakanlah media massa untuk untuk mengubah konstruksi pola pikir serta sudut pandang masyarakat terhadap kekerasan pada perempuan. Media massa yang dapat digunakan untuk mengubah sudut pandang masyarakat terhadap suatu isu sosial adalah film. Sehingga isu mengenai kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat dilihat melalui film berjudul *Like & Share* (2022) karya Gina S. Noer.